

STATUS PEREMPUAN PARTAI POLITIK DPW PKB JAWA TIMUR

Setelah hampir tiga puluh dua (32) tahun, era tinggal landas pembangunan yang ditetapkan Orde Baru terpaksa kandas di tengah jalan ketika badai krisis ekonomi dan moneter menerjang kawasan Asia pada Juli tahun 1997. Di Indonesia, peristiwa tersebut membawa dampak pada goyangnya tonggak pembangunan ekonomi yang dipancarkan penguasa Orde Baru. Kemudian krisis mata uang regional tersebut berujung pada kisruh politik, ekonomi dan keamanan yang sangat hebat bagi Indonesia. Dan pada gilirannya, legitimasi Orde Baru dari sisi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik pun setahap demi setahap sirna.

42

Pertemuan-pertemuan tersebut membicarakan bagaimana seharusnya peran warga NU yang telah lama termarginalisasi dalam arus perubahan yang tengah bergerak akseleratif nyaris tak terkendali itu. Berbagai masukan, desakan dan ragam interpretasi pun bermunculan menyikapi situasi politik nasional yang sarat dengan ketidakpastian. Arah pembicaraan pun kemudian semakin mengkristal pada sebuah pilihan, yaitu tentang perlunya warga NU memiliki suatu wadah untuk menampung aspirasi politiknya.² Dalam konteks ini sebagian besar warga NU menginginkan pada masa-masa mendatang terjadinya sebuah pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional dan demokratis melalui perpanjangan tangan politik yang berbentuk partai politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi politik mengingat sebagian besar warga negara Indonesia merupakan warga Nahdhatul 'Ulama.

² Wawancara, Anisa Sakura, Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur, 1 juni 2016.

Menyikapi kondisi sosial dan realitas politik yang sedang berlangsung saat itu, PBNU tidak dapat menutup mata dan mengabaikan desakan yang begitu deras yang mengarah kepada PBNU. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, K.H. M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), H.M. Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad

[illegible]

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H. Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H. Abdul Aziz, M.A., Drs. H. Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H. Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk partai politik baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.⁵ Hal penting yang dinyatakan dalam

⁴ Nadhif Alawi (ed.), *Partai Kebangkitan Bangsa dan Pemilu 2004: Kesiapan PKB Menjelang pemilu2004*, (Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat PKB, 2003), h. 3.

Alawi (ed.), Partai Kebangkitan Bangsa dan Pemilu 2004 (Jakarta: Lembaga Pememenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat PKB, 2003), h. 3.

Dalam Anggaran Dasar PKB dicantumkan bahwa tujuan PKB adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin, materi-spritual, dan mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, bersih dan terbuka, dan berakhlakul karimah.⁸

[illegible]

⁹ Wawancara, Aida Fitriati Anggota Perempuan Bangsa Jawa Timur, 13 Juli 2016.

[illegible]

[illegible]

DPW PKB Jawa Timur berlokasi di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur di alamat Jl. Ketintang Madya 153 - 155 Surabaya, DPW PKB Jawa Timur diketuai oleh Bapak H. Halim Iskandar,M.si dan sekretaris nya H. Thoriqul Haq,M.ML, DPW PKB Jawa Timur memiliki Cabang di Kota-kota yang ada di Jawa Timur, hamper di seluruh kota yang ada di Jawa Timur terdapat Cabang dari DPW PKB.

DPW PKB Jatim mempunyai peran yang sangat penting di dunia perpolitikan yang ada di Jawa Timur khususnya, pada Pemilihan Umum

[illegible]

Melihat potensi perempuan di PKB yang cukup signifikan, maka diupayakan berdiri satu badan Otonom yang berfungsi sebagai wadah perempuan dalam menyuarakan pendapatnya baik secara sosial maupun politik. Wadah tersebut diberi nama dengan PEREMPUAN BANGSA (PBPKB).

Perempuan Bangsa (PB) adalah barisan perempuan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan salah satu organisasi sayap PKB yang konsisten terhadap perempuan baik dalam bidang politik, sosial, budaya dan agama. Kehadiran organisasi sayap perempuan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas terutama kalangan perempuan. Sebagai makhluk feminis, perempuan kerap menjadi salah satu objek dari ketidakadilan gender di berbagai hal dalam kehidupan nyata.¹⁵

Perempuan Bangsa merupakan women wings atau sayap politik Partai Kebangkitan Bangsa unsur perempuan yang dibentuk sebagai media untuk menggalang dukungan politik, meningkatkan kapasitas politik , meningkatkan

¹⁴ Wawancara, Aufa Nadiroh Staff Ahli (Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur), 09 Juli 2016.

¹⁵ <http://pkb.or.id/perempuan-bangsa-harus-jadi-motor-penyelesaian-permasalahan-perempuan-indonesia#sthash.VIySs1rJ.dpuf>

1. Memperjuangkan kesetaraan gender khususnya hak-hak perempuan;
2. Memperkuat posisi PKB sebagai partai politik yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan;
3. Memperkuat kapasitas partisipasi politik perempuan;
4. Mendistribusikan peran politik perempuan dalam struktur partai, parlemen, pemerintah serta jabatan publik lainnya;

- a. Organisasi tingkat Pusat dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP;
- b. Organisasi tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah disingkat DPW;

[illegible]

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah aspirasi dan perjuangan karakter dan garis perjuangan tempat di mana Partai ini dilahirkan. Sebagai Jam'iyah Diniyyah yang berkewajiban amar ma'rūf nah munkar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik secara pribadi maupun kelompok, NU tidak dapat mengelak tanggung jawab dalam berperan serta membangun kehidupan politik bangsa Indonesia yang adil, demokratis dan berakhlak mulia di atas landasan-landasan ketaqwaan kepada Allah SWT.

[illegible]

¹⁷ UU No. 17 Tahun 2007 tentang *RPJPN* 2005-2025

[illegible]

Beberapa regulasi yang menjadi ikon karena kedekatannya dengan kebutuhan rakyat dan konstituen PKB, yaitu UU Pangan dan UU Desa menjadi perhatian utama bagi PKB dan seluruh perangkatnya. UU Pangan yang mengamanatkan adanya kedaulatan dan kemandirian pangan harus dikawal agar mencerminkan perspektif keadilan gender, khususnya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan atas pangan.

[illegible]

Mengingat situasi perempuan yang merupakan pengelola pangan, masih kesulitan mengakses hak atas pangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Karenanya pada tingkat implementasi UU Pangan harus memberikan jaminan perlindungan perempuan diberbagai bidang kehidupan.

Demikian pula UU desa harus benar-benar di kawal agar efektivitas program berbasis desa tercapai. Tujuan UU Desa yang ingin membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan harus mendapat perhatian dari segi pengawasan implementasi dari UU tersebut serta memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Desa (BPD).

PKB juga telah mengejawantahkan amanat UU Partai Politik maupun UU Pemilu untuk menempatkan potensi kader perempuan menduduki jabatan structural di Partai Politik, maupun mendistribusikan kader potensial untuk menjadi calon anggota legislatif secara proporsional pada pemilu 2014. Berbagai kebijakan PKB secara umum yang terkait dengan rekrutemen potensi kader perempuan tentu tidak menafikan ragam kontribusi pemikiran dari perangkat atau badan otonom yang memiliki segmen kaum perempuan yaitu Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.

Guna merumuskan berbagai gagasan baru yang menjadi mandate PKB maupun tanggungjawab moral sebagai institusi, maka dalam kesempatan Musyawarah Nasional III Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa bermaksud merumuskan garis-garis besar program kerja nasional.

Selain itu, untuk mempermudah merumuskan garis-garis besar program nasional Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa maka perlu diketengahkan analisa SWOT sebagai alat untuk melihat kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) keberadaan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.

[illegible]

- a. Memiliki segmen garapan yang jelas yaitu kaum perempuan. Secara populatif jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki demikian halnya dari segi jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki. Dari segi jumlah tentu menjadi kekuatan secara teoritik mempermudah mencari sumber rekrutmen caleg perempuan maupun untuk mendongkrak suara PKB.
- b. Dari segi loyalitas, kesetiaan dan konsistensi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa merupakan badan otonom PKB yang setia, istiqomah akan arah dan kebijakan PKB, Pergerakan Perempuan kebangkitan Bangsa belum pernah memicu munculnya konflik yang secara structural maupun horizontal mempengaruhi eksistensi PKB.
- c. Isu kesetaraan dan keadilan gender merupakan isu mondial merupakan kekuatan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa. Konsep kesetaraan dan keadilan gender yang harus terpenuhi dalam prinsip demokrasi mendapat dukungan luas (mondial) dari kalangan masyarakat sipil kemudian dibreakdown ke berbagai payung hukum sehingga lahir kebijakan *affirmative action* (kuota 30%) keterwakilan perempuan di berbagai bidang pembangunan dapat terapkan.

Dari segi kelemahan Perempuan Bangsa dapat dinalisa sebagai berikut:

Dari segi kelemahan Perempuan Bangsa dapat dinalisa sebagai berikut:

- a. Lambannya penyelenggaraan kaderisasi, padahal kader merupakan organ yang sangat vital dalam organisasi yang mau dan mampu mewakafkan pikiran, tenaga moral maupun material untuk mempertahankan dan mengembangkan keberadaan organisasi. Sesungguhnya dengan konsistensi melakukan kaderisasi PKB tidak kesulitan mencari stock SDM untuk rekrutemen caleg maupun yang akan didistribusikan di berbagai tempat strategis baik didalam maupun diluar Partai. Dengan kaderisasi pula akan melahirkan kepemimpinan yang tidak instan dan mumpuni secara leadership.
- b. Manajemen organisasi perlu diperbaiki. Roda organisasi sesungguhnya terletak pada bagaimana sistem manajemen itu berfungsi. Mengingat Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa secara politis terkena imbas oleh dinamika internal yang terjadi di PKB maka sempat terjadi kevacuuman dalam hal kepemimpinan di berbagai tingkatan rentang waktu 2007-2010, sehingga secara manajerial harus memulai kembali dari awal.
- c. Lemahnya SDM perempuan sehingga mempengaruhi posisi tawar dan secara kuantitatif tidak banyak yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan partai, serta distribusi peran yang tidak setara. Meskipun secara konseptual, gagasan dan visi besarnya PKB telah dapat dikategorikan sebagai sebuah partai yang pro-gender equity, namun dalam praktek politiknya PKB masih didominasi oleh struktur dan kultur sosial politik yang kurang menghargai kesetaraan gender.

b. Tantangan untuk melahirkan kepemimpinan yang jujur, bersih dan bertanggungjawab. Problem beratnya menciptakan good governance, salahsatunya dengan cara menghentikan segala praktek korupsi menjadi tantangan bagi kepemimpinan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang terutama yang telah mendapat mandat rakyat baik sebagai legislative, dan eksekutif untuk memelopori terciptanya Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN).

c. Keputusan MK tentang pemilu serentak tahun 2019. Meskipun masih memunculkan debatable dan banyak penafsiran atas putusan MK mengani pemilu serentak tahun 2019,namun bagi Peregerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa harus menyiapkan resources atas konstalasi politik yang akan terjadi pada tahun 2019. Terutama menyiapkan potensi kader perempuan untuk terlibat di bagian strategis dalam perjalanan Partai Kebangkitan Bangsa dimasa -masa yang akan datang.²⁰

²⁰ AD/ART PKB hasil Mukatmar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta, 2-4 Mei 2008

Menurut Anisah, jumlah suara pemilih perempuan lebih besar daripada laki-laki. Di Provinsi Jatim tercatat ada 8.505 desa yang jika setiap desa memiliki minimal lima orang pengurus KPP, maka minimal sudah ada 42.525 kader vote-gater. Hal itu akan berkembang lebih besar dan berlipat ganda, karena setiap kader minimal memiliki anggota keluarga dan sanak famili.

[illegible]

Garis-garis besar Program kerja Pergerakan Perempuan kebangkitan Bangsa secara umum dan legal formal mengacu pada tujuan, dan usaha yang dikembangkan oleh PKB yaitu: PKB bertujuan sebagai berikut:

- Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha- usaha sebagai berikut:

- [illegible]

c. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.

d. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.

e. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa; Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.

f. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.²¹

²¹ PD/PRT Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, hlm.177.

- [illegible]

Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa jika memposisikan sebagai media perjuangan perempuan PKB maka orientasi program kerja mengarah pada upaya-upaya sebagai berikut:

- [illegible]

- [illegible]

Visi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yaitu 'Terwujudnya peningkatan keterwakilan perempuan di struktur partai, parlemen, dan eksekutif secara nasional untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat khususnya perempuan melalui gender budgeting dan legislasi yang berperspektif perempuan dan Penyebaran organisasi secara nasional baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

1. Memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan;
2. Memperkuat posisi PKB sebagai partai politik yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan;

[illegible]

Secara Nasional Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa senantiasa membumikan nilai perjuangan PKB yang termaktub dalam Mabda' Siyasi PKB antara lain mencantumkan bahwa kekuasaan itu merupakan sarana untuk mendistribusikan sumberdaya demi kemaslahatan ummat. Kondisi obyketif masyarakat PKB terutama secara kultural warga Nahdliyyin masih mengalami ketertinggalan di segala bidang. Warga PKB yang 70% tinggal dipedesaan yang notabene matapencaharannya sebagai petani, nelayan, dan buruh perkebunan sangat membutuhkan implemnetasi kebijakan yang berpihak pada mereka. Karenanya Pergerakan Perempuan kebangkitan Bangsa menselaraskan paradigma politik rahmatan lil'alamiin

[illegible]

I. Konsolidasi Organisasi

Konsolidasi organisasi merupakan ruh bagi keberadaan PKB sebagai anak kandung reformasi yang dalam catatan sejarah terlibat dalam percaturan perpolitikan Indonesia sejak tahun 1998 sampai memasuki Pemilu 2014-2019. Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan (organisasi), kepengurusan, militansi kader dan meningkatnya jumlah anggota/simpatisan, maka Perempuan Bangsa perlu merumuskan dan menjalankan program sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembentukan kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Cabang, Dewan pengurus Anak Cabang, Dewan Pengurus Ranting dan Dewan pengurus Anak Ranting.
2. Memantapkan sistem dan pola rekrutmen kader dan Pengurus yang bersifat rasional, obyektif, dan berorientasi kepada penciptaan efektifitas pengelolaan organisasi dan program pelayanan kepada masyarakat, antara lain penyusunan konsep pendidikan kader Perempuan Bangsa, buku panduan pelaksanaan pendidikan kader Perempuan Bangsa dan melaksanakan pendidikan kader di semua tingkat organisasi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.
3. Mengembangkan dan memantapkan jatidiri PKB sebagai partai terbuka dan modern, dengan indikator; kemandirian, ketersediaan kader dan

Secara khusus jika ditelusuri lebih lanjut kondisi obyektif perempuan masih tertinggal di berbagai bidang pembangunan:

1. Bidang Pendidikan

[illegible]

- a. Berpartisipasi aktif dalam perjuangan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pembangunan, sesuai amanat konstitusi, agar anak usia sekolah dapat terpenuhi haknya atas pendidikan.
- b. Mendorong dan memperjuangkan pendidikan akhlak, multikulturisme dan harmoni social dalam semua jenjang dan jenis pendidikan.
- c. Meneruskan program kajian dan perbaikan terhadap kurikulum pendidikan yang masih bias gender agar bermuatan keberpihakan kepada perempuan secara adil untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.
- d. Mendorong dan memajukan secara maksimal dan melakukan keberpihakan kepada nasib madrasah dan pondok pesantren, berikut segala hal yang berkaitan dengan lembaga tersebut.
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemampuan dan wawasan para pendidik di semua tingkatan mengenai pendidikan yang berperspektif gender dan anti kekerasan.
- f. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik dan demokratisasi.
- g. Menyelenggarakan pendidikan pelatihan bekerjasama dengan LSM dan penegak hukum untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
- h. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai media, seperti media cetak, leaflet, brosur, spanduk, media

Memfasilitasi forum yang diperlukan oleh kalangan pelajar dan remaja putri, pemuda, mahasiswi, kelompok hobi, paguyuban kesenian, dan sebagainya dengan membuat kegiatan seperti bakti sosial, pertandingan olah raga, pentas seni, diskusi, pameran kerajinan rakyat dan sebagainya yang disesuaikan dengan potensi daerah,

Secara obyektif angka kematian Ibu (AKI) harus turun menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup sementara angka 259 per 100.000 kelahiran hidup sementara. Pada bulan Januari sampai dengan Maret 2014 jumlah terdapat data baru sebanyak 6.626 kasus. Dengan laki dan perempuan 1:1, menurut Badan Narkotika pengguna Narkotika dengan segala tingkat risiko pengguna maka kondisi ini memerlukan pendekatan. Secara realistis hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan aksi antara lain:

- Mengadvokasi dari segi regulasi agar p
- Kesehatan Ibu dan Anak mendapat perhatian.

Secara obyektif angka kematian Ibu (AKI) masih berkisar angka 259 per 100.000 kelahiran hidup sementara target MDG's AKI harus turun menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Ken

Mengadvokasi dari segi regulasi agar percepatan penanganan Kesehatan Ibu dan Anak mendapat perhatian.

- ### 3. Bidang Ekonomi

a. Mendorong dan mengupayakan terciptanya iklim yang sehat bagi terbukanya akses perempuan dan perlindungan dalam produktivitas pangan.

- #### 4. Bidang politik

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melalui PKB dan Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong penataan kembali peraturan perundangan (*law reform*), khususnya peraturan perundangan yang tidak pro rakyat dan bias gender serta berpotensi untuk timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan, serta berperanserta dalam pembahasan rancangan peraturan perundangan, agar lebih pro rakyat dan tidak bias gender serta tidak berpotensi untuk timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan.

- a. Melalui PKB dan Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong penataan kembali peraturan perundangan (*law reform*), khususnya peraturan perundangan yang tidak pro rakyat dan bias gender serta berpotensi untuk timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan, serta berperanserta dalam pembahasan rancangan peraturan perundangan, agar lebih pro rakyat dan tidak bias gender serta tidak berpotensi untuk timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan.

- Pasal 58.
- d. Melakukan pendidikan politik rakyat akar rumput khusus perempuan.
Ini dilakukan antara lain dengan cara memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dan memanfaatkan para pendamping sebagai organisir.
- e. Mendorong, mendukung dan menyiapkan kader-kader dan simpatisan partai, khususnya perempuan yang memiliki kualifikasi profesional dan kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dan birokrasi pemerintahan daerah.
- f. Meningkatkan kapasitas kader dan simpatisan partai, khususnya perempuan untuk menyongsong Pemilu serentak 2019.

5. Bidang Hukum

Kondisi obyektif kekinian secara umum masyarakat masih jauh akan melek hukum, Persoalan agraria yang mencuat kepermukaan akhir-akhir ini, merupakan implikasi dari orientasi ekonomi dan kebijakan agraria di masa lalu. Persoalan ini berurat akar pada masa yang panjang sejak kolonial, orde baru dan hingga kini. Warisan kebijakan tersebut ternyata makin membuat ketimpangan penguasaan agraria hingga menyebabkan

a. Membuka pelayanan dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan pada setiap Wilayah dan atau Cabang yang memungkinkan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum, LSM dan perguruan tinggi.

- a. Mendorong berbagai regulasi baik berupa UU maupun Perda yang melarang eksploitasi sumberdaya alam, sementara masyarakat lingkungan yang dekat dengan sumberdaya alam seperti masyarakat hutan, masyarakat tambang masih jauh dari berkecukupan
- b. Gerakan pelestarian lingkungan guna memulihkan kembali spesies hayati yang nyaris punah guna keseimbangan ekosistem.
- c. Gerakan budaya bersih, green building, green house dan *back to nature*

Media massa yang sebenarnya adalah sarana informasi yang layak, memadai, jujur dan adil, pada kenyataannya masih banyak bentuk-bentuk penyampaian dan peliputan melalui media yang bias gender dan masih menggunakan perempuan sebagai objek seksual dan pomografi. Karena itu diperlukan upaya keras dan serius untuk menghapus budaya eksploitasi (tindak kekerasan) terhadap perempuan, dengan bentuk bentuk kegiatan sebagai berikut:

Penelitian dan Pengembangan; dimaksudkan untuk : pertama, telaah terhadap kondisi lapangan, sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan organisasi; kedua adalah dalam rangka penciptaan wacana publik, penciptaan opini, maupun respon solutif atas masalah yang sedang berkembang, antara lain:

- [illegible]

- b. Kajian masalah ketatanegaraan (menyangkut produk-produk hukum dan perundangan seperti: UUD, UU, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perda dan sebagainya) dengan fokus kajian representasi dan peluang partisipasi bagi perempuan (perspektif gender), sebagai bahan untuk memberikan masukan pada setiap proses penyusunan produk-produk tersebut.
- c. Kajian agama yang menyangkut kedudukan perempuan, nilai-nilai yang dapat menjadi pegangan dan motivasi bagi perempuan; dan berbagai kajian tentang perempuan dari perspektif agama.
- d. Pembekalan dan peningkatan kapasitas kader dalam kegiatan kajian dan penelitian, melalui diklat, magang, pelibatan dalam kegiatan penelitian dan sebagainya.

10. Bidang Fund Raising

Persoalan sumberdana merupakan organ penting dalam organisasi. Ibarat tubuh tanpa darah fungsinya akan terganggu. Oleh karena itu persoalan sumberdana harus mendapat perhatian secara manajemen. Adapun berbagai kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menyusun konsep dan strategi penggalian dana
- b. Melakukan mapping sumber pendanaan yang bisa dikerjasamakan baik dalam bentuk profit maupun sosial, semisal mengoptimalkan Koperasi sebagai badan usaha yang dapat mendukung sumber pembiayaan organisasi.

